



Analisis Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Jambi Menurut Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Septiana Louisa Silaban^{1*}, Sutri Destemi Elsi², Dimas Rizal³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jambi, Indonesia

*Penulis Korespondensi : Septianalouisa12@gmail.com

Abstract. *Makan Bergizi Gratis (MBG) program is a national policy designed to improve the nutritional quality of children and support human resource development. However, its implementation at the regional level still faces various institutional and coordination issues. This study aims to analyze the implementation of the Free Nutritious Meals program in Jambi City, focusing on the dynamics of program implementation and the inhibiting factors. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with policy implementers and documentation with informants determined through purposive sampling. Data analysis was conducted using Merilee S. Grindle policy implementation theory through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the implementation of the MBG program in Jambi City has not been running optimally. This condition is characterized by the strong dominance of the central government in the decision making process, weak coordination between actors at the regional level, and inadequate readiness of supporting institutions, especially in aspects of human resources, monitoring system, and clarity of operational standards for implementation.*

Keywords: *Dynamics; Inhibiting Factors; Nutritious Meal Program; Policy Implementation; Public Policy*

Abstrak. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi pada anak-anak serta mendukung pembangunan sumber daya manusia. Namun dalam pelaksanaannya di tingkat daerah masih dihadapkan pada berbagai persoalan kelembagaan dan koordinasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program Makan Bergizi Gratis di Kota Jambi dengan fokus pada dinamika dalam implementasi program serta faktor-faktor penghambat dengan perspektif implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pelaksana kebijakan, serta dokumentasi dengan para informan yang telah ditentukan berdasarkan purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBG di Kota Jambi belum berjalan secara optimal. Kondisi ini ditandai karena kuatnya dominasi pemerintah pusat dalam proses pengambilan keputusan, lemahnya koordinasi antaraktor di tingkat daerah, serta belum memadainya kesiapan kelembagaan pendukung, terutama pada aspek sumber daya manusia, sistem pengawasan, dan kejelasan standar operasional pelaksanaan

Kata kunci: Dinamika; Faktor Penghambat; Implementasi Kebijakan; Kebijakan Publik; Makan Bergizi Gratis

1. LATAR BELAKANG

Sebuah Kebijakan umumnya dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat luas baik dalam bentuk peraturan maupun keputusan (Rawis, 2025). Dalam praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang berlangsung dalam suatu sistem pemerintahan, di mana terdapat langkah-langkah atau upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Selain itu, kebijakan publik juga sangat dipengaruhi oleh peran dan fungsi aparat pemerintahan yang dikenal sebagai birokrasi (Anggara, 2014).

Salah satu bentuk instrumen dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah program. Program dapat dipahami sebagai seperangkat kegiatan yang disusun secara sistematis untuk mencapai sasaran tertentu dari suatu kebijakan (Indra, 2023). Program merupakan turunan dari

kebijakan yang bersifat umum, sehingga tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, efektivitas koordinasi antarinstansi, serta keterlibatan aktor pelaksana di tingkat lapangan. Dengan demikian, kebijakan berperan sebagai arah dan kerangka strategis, sedangkan program menjadi sarana praktis untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut dalam ranah pemerintahan.

Salah satu kebijakan strategis yang belakangan ini mendapat perhatian publik adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sebelumnya dikenal sebagai Program Makan Siang Gratis (Ajeng & Yusmar, 2025). Program ini merupakan bentuk dari realisasi janji politik pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam pemilihan Presiden periode 2024-2029, yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas gizi secara berkelanjutan (Setuningsih, 2024).

Program ini merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tercantum dalam Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional. Program MBG ini mulai dilaksanakan secara resmi pada 6 Januari 2025 dengan menysasar 26 Provinsi untuk pelaksanaan awalnya. Program ini memiliki target penerima mencapai 82,9 juta orang. yang dilayani melalui sekitar 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) (Idris et al., 2025). Program ini menysasar kelompok masyarakat yang dinilai rentan terhadap permasalahan gizi, yaitu balita, peserta didik mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), baik di sekolah negeri maupun swasta. Selain itu program MBG juga ditujukan bagi ibu hamil dan ibu menyusui sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat secara berkelanjutan (Suryana & Azis, 2025)

Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan kebijakan nasional yang disusun sebagai langkah strategis pemerintah. Program ini dilaksanakan melalui mekanisme terpusat dan difokuskan pada satuan pendidikan sebagai kelompok sasaran utama, dengan tujuan memastikan pemerataan akses pangan bergizi yang merata bagi seluruh peserta didik tanpa adanya diskriminasi (Nooraini et al., 2025). Dalam perspektif kebijakan publik, program MBG tidak hanya dipahami sebagai upaya pemenuhan gizi saja, tetapi juga sebagai kebijakan instrumen kebijakan sosial yang pelaksanaannya melibatkan berbagai aktor dari berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan.

Di Kota Jambi, Program MBG mulai dijalankan pada 17 Februari 2025 Antara, (2025) dengan melibatkan sejumlah sekolah-sekolah dan lembaga pendukung. Namun dalam pelaksanaannya masih muncul berbagai dinamika, terutama yang berkaitan dengan kesiapan kelembagaan, koordinasi antaraktor, dan ketersediaan sumber daya yang mendukung program.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dipandang hanya sebagai pelaksanaan teknis atas aturan yang telah ditetapkan. Implementasi merupakan proses yang dipengaruhi oleh kondisi politik dan administratif di tingkat lokal (Solichin, 2015). Perbedaan kapasitas birokrasi, kepentingan para aktor yang terlibat, serta pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi program MBG di tingkat daerah menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan nasional dijalankan dalam konteks lokal yang memiliki karakteristik dan keterbatasan tertentu (Ekaputra et al., 2025)

Dalam Perspektif implementasi kebijakan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya konteks implementasi (*context of implementation*). Dalam hal ini, teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle dalam Agustino (2020) memberikan kerangka analisis yang relevan untuk menelaah dinamika maupun hambatan dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks implementasi ini, terdapat indikator yang meliputi 1. Besarnya kekuasaan, kepentingan dan strategi, 2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, 3. Tingkat Kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran, dalam pelaksana kebijakan.

Urgensi penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan strategis berskala nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), diimplementasikan pada tingkat daerah. selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga efektivitas program belum sepenuhnya tercapai. Pemahaman terhadap dinamika implementasi dan hambatan yang muncul menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan upaya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan, agar tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diwujudkan secara optimal. Di samping itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian implementasi kebijakan publik di Indonesia, khususnya terkait pelaksanaan kebijakan yang bersifat terpusat dalam konteks otonomi daerah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika implementasi kebijakan program MBG di Kota Jambi serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Analisis dilakukan dengan menitikberatkan pada konteks implementasi yang meliputi besarnya kekuasaan dan kepentingan para aktor yang terlibat, karakteristik kelembagaan dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas

kelompok sasaran. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kompleksitas pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas program pada masa yang akan datang.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980) yang dikenal dengan konsep *implementation as politics and administration*. Konsep ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan publik tidak semata-mata merupakan persoalan teknis administratif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang menyertainya.

Indikator pertama dalam konteks implementasi adalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor dalam pelaksanaan kebijakan. Dimensi ini mengkaji bagaimana hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempengaruhi jalannya program, bagaimana perbedaan kepentingan antaraktor dikelola, serta strategi yang digunakan masing-masing aktor untuk mencapai tujuan tertentu. Grindle menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang sarat dengan interaksi dan tarik-menarik kepentingan sehingga negosiasi dan kompromi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaannya.

Indikator kedua adalah karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa. Dimensi ini menelaah pengaruh kapasitas kelembagaan, pola koordinasi antarlembaga, kerangka regulasi, serta mekanisme birokrasi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Grindle berpendapat bahwa karakter institusi, termasuk pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, kualitas sumber daya manusia serta sistem pengawasan dan akuntabilitas, sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik di lapangan.

Indikator ketiga adalah tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Dimensi ini mengkaji sejauh mana kelompok sasaran menerima, mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kinerja aparatur pemerintah, tetapi juga oleh sikap dan keterlibatan kelompok sasaran. Tingkat kepatuhan dan responsivitas tersebut dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap tujuan kebijakan, persepsi terhadap manfaat program, serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah sebagai pelaksana kebijakan.

Sejumlah studi menganalisis MBG dari berbagai sisi, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Nissa et al., (2025) menyoroti bagaimana program MBG berdampak pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan status gizi, partisipasi dalam pendidikan, serta kondisi ekonomi. Penelitian kedua dari Yuliana, R. A., & Hermawati, (2025) yang membahas

program Makan Bergizi Gratis dengan menitikberatkan pada aspek politik dan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa program tidak semata-mata dipahami sebagai kebijakan pemenuhan gizi, melainkan juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun dukungan publik dan memperkuat citra pemerintah.

Sejalan dengan temuan tersebut, Albaburrahim et al., (2025) menjelaskan program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya pembaruan sektor pendidikan dalam rangka mewujudkan visi generasi emas 2045 dengan menekankan orientasi jangka panjang dari kebijakan ini. Terakhir pada aspek tata kelola dan pelaksanaan program, penelitian yang dilakukan oleh Febryanti et al., (2025) mengkaji implementasi MBG dengan penekanan pada tingkat ketentuan yang berlaku, khususnya peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Sebagai dasar hukum pelaksanaan program.

Dengan demikian, teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980), khususnya pada aspek konteks implementasi ini, digunakan sebagai kerangka untuk memahami pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Jambi. Kajian teoritis ini juga menjadi dasar analisis dalam menelaah hubungan kekuasaan antaraktor, menilai karakteristik kelembagaan dan birokrasi pelaksana, serta mengkaji tingkat kepatuhan dan respons kelompok sasaran dalam mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pemilihan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika implementasi kebijakan program Makan Bergizi Gratis di Kota Jambi serta berbagai faktor yang menghambat pelaksanaannya. Bungin, (2007) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami realitas melalui interaksi secara langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemaknaan, konteks, dan penafsiran data naratif, sehingga mampu menggambarkan fenomena sosial secara utuh dan mendalam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini di fokuskan pada dinamika implementasi dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kota Jambi dengan menyoroti tiga indikator utama dari teori Merile S. Grindlee, yaitu 1. Besarnya kekuasaan, kepentingan dan strategi, 2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, 3. Tingkat Kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran, dalam pelaksana kebijakan.

Dinamika Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Jambi

Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Jambi berlangsung dalam struktur kekuasaan yang bersifat hierarkis, di mana pemerintah pusat memegang peran dominan dalam penetapan arah kebijakan. Badan Gizi Nasional, sebagai lembaga yang dibentuk langsung di bawah Presiden, memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan standar operasional prosedur, mekanisme pelaksanaan, serta sistem pelaporan dan evaluasi program. Kewenangan tersebut memberikan dasar legitimasi yang kuat terhadap kebijakan, namun pada saat yang sama membatasi ruang pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi lokal.

Pemerintah Provinsi Jambi berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Pemerintahan Daerah I Provinsi Jambi, peran provinsi lebih difokuskan pada aspek koordinasi, pendampingan teknis, fasilitasi kerja sama lintas sektor, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Meskipun demikian, kewenangan provinsi tetap berada dalam batas yang ditentukan oleh kebijakan pusat, sehingga ruang untuk melakukan penyesuaian kebijakan sesuai karakteristik daerah relatif terbatas. Kondisi ini tercermin dari upaya pemerintah provinsi yang menekankan profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik, namun tidak disertai dengan fleksibilitas kebijakan yang memadai.

Pada tingkat Kota Jambi, kewenangan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan strategis lebih terbatas dibandingkan pemerintah provinsi. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Jambi menyampaikan bahwa seluruh ketentuan pelaksanaan program telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga peran pemerintah kota lebih terfokus pada pelaksanaan teknis di lapangan, termasuk mengikuti mekanisme anggaran yang telah ditentukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program MBG di Kota Jambi cenderung bersifat top-down, dengan ruang inovasi dan inisiatif lokal yang relatif minimal dalam proses pelaksanaannya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program memiliki kepentingan yang tidak selalu berjalan searah, meskipun secara formal mengacu pada tujuan kebijakan yang sama. Pemerintah Pusat menempatkan prioritas pada keseragaman pelaksanaan dan akuntabilitas program di tingkat nasional, dengan fokus utama pada luasnya cakupan penerima manfaat serta kontribusi program terhadap upaya penurunan angka stunting secara nasional.

Sementara Pemerintah Provinsi Jambi berada pada posisi yang menuntut kemampuan menyeimbangkan kewajiban pelaporan kepada pemerintah pusat dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan terhadap karakteristik dan potensi daerah. Dalam konteks ini, strategi yang dikembangkan diarahkan pada penguatan kerja sama lintas tingkat pemerintahan melalui pemanfaatan produk pangan lokal yang tetap memenuhi standar gizi, sehingga program dapat berjalan sejalan dengan penguatan ekonomi daerah.

Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Jambi memiliki kepentingan yang bersifat operasional sekaligus politis. Secara substantif, pemerintah daerah berkepentingan agar program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi peserta didik sebagai kelompok sasaran. Pada saat yang sama, terdapat kepentingan untuk menjaga legitimasi serta kepercayaan publik, mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan nasional yang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Untuk merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kota Jambi menerapkan strategi keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program, antara lain dengan menyampaikan secara terbuka daftar sekolah penerima, jumlah siswa yang terlayani, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengelola harapan publik yang tinggi di tengah keterbatasan sumber daya yang ada.

Dinas Pendidikan sebagai *leading sector* utama memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Strategi yang diterapkan difokuskan pada penguatan koordinasi melalui mekanisme komunikasi berjenjang, seperti pemanfaatan grup komunikasi daring untuk pertukaran informasi cepat serta pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala dengan kepala sekolah.

Di sisi lain, Dinas Kesehatan menaruh perhatian pada aspek keamanan dan kesehatan pangan, dengan kepentingan utama mencegah munculnya risiko kesehatan akibat makanan yang dikonsumsi siswa. Upaya yang dilakukan berupa pemeriksaan rutin terhadap dapur SPPG dengan menggunakan daftar periksa standar yang mencakup aspek kebersihan dan keamanan pangan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan jumlah tenaga pengawas.

SPPG sebagai pelaksana teknis program memiliki kepentingan pada kelancaran operasional dan efisiensi distribusi. Untuk mendukung tujuan tersebut, SPPG membangun kemitraan dengan pelaku usaha mikro dan kecil di daerah sebagai penyedia bahan pangan, menetapkan pembagian tugas yang jelas dalam setiap tahapan kerja (mulai dari perencanaan dan logistik, produksi, pengendalian mutu, hingga distribusi) serta menjalin komunikasi intensif dengan pihak sekolah.

Adapun sekolah sebagai pelaksana di tingkat paling bawah berkepentingan agar peserta didik menerima makanan yang berkualitas dan tepat waktu tanpa mengganggu proses

pembelajaran. Strategi yang dikembangkan oleh sekolah bervariasi, antara lain melalui penunjukan guru piket maupun pembentukan tim khusus yang bertugas menerima, mengawasi, dan memastikan kelancaran distribusi makanan.

Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

Karakteristik kelembagaan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi pelaksanaan program. Dari aspek sumber daya manusia, penelitian menemukan adanya keterbatasan jumlah tenaga profesional yang secara khusus ditugaskan menangani Program Makan Bergizi Gratis. Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa jumlah tenaga sanitarian dan ahli gizi yang tersedia belum sebanding dengan perluasan cakupan program, sehingga beban kerja pengawasan cenderung meningkat. Kondisi serupa juga dialami oleh SPPG, yang menghadapi keterbatasan kapasitas dapur dan peralatan produksi. Keterbatasan tersebut berdampak pada proses produksi makanan dalam jumlah besar dan berkontribusi pada keterlambatan distribusi ke sekolah.

Dari sisi infrastruktur, dapur SPPG pada dasarnya telah dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung produksi, seperti kompor berkapasitas besar, peralatan memasak, fasilitas penyimpanan bahan pangan, serta kendaraan distribusi. Namun, kapasitas infrastruktur tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan seluruh sekolah sasaran secara optimal. Dalam pelaksanaannya, struktur operasional SPPG dibagi ke dalam beberapa unit kerja, meliputi perencanaan dan logistik, produksi, pengendalian mutu, serta distribusi. Seluruh unit ini bekerja secara intensif sejak dini hari hingga siang hari untuk memastikan makanan dapat diterima sekolah sesuai jadwal.

Mekanisme koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan melalui rapat koordinasi rutin, baik secara daring maupun luring, dengan frekuensi minimal satu kali dalam sebulan dan dapat ditingkatkan apabila terdapat isu mendesak. Sementara itu, koordinasi horizontal di tingkat daerah dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi kota yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah terkait. Koordinasi ini didukung oleh rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala serta komunikasi harian melalui media pesan instan. Meskipun kerangka koordinasi formal telah tersedia, dalam praktiknya masih ditemukan kendala yang menyebabkan lambatnya penanganan persoalan teknis di lapangan.

Sistem pengawasan terhadap pelaksanaan program dilakukan pada beberapa tingkatan. Dinas Kesehatan melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap dapur SPPG dengan frekuensi minimal dua kali dalam sebulan, menggunakan daftar periksa yang mencakup aspek kebersihan dapur, penyimpanan bahan pangan, proses pengolahan, kondisi kesehatan pekerja, serta pengelolaan limbah. Di tingkat sekolah, pengawasan dilakukan oleh guru atau tenaga

kependidikan yang ditunjuk sebagai koordinator program, dengan fokus pada pengecekan kondisi makanan saat diterima dan pengawasan proses pembagian kepada siswa. Namun, pengawasan di tingkat sekolah masih bersifat sederhana dan terbatas pada penilaian fisik makanan, tanpa dukungan pemeriksaan teknis yang lebih mendalam.

Pada tahap awal pelaksanaan, sistem pelaporan program masih dilakukan secara informal melalui media komunikasi daring, sebelum kemudian dikembangkan ke dalam sistem pelaporan digital dengan format yang lebih terstruktur. Pemerintah Kota Jambi menerapkan mekanisme pelaporan berjenjang, di mana sekolah menyampaikan laporan pelaksanaan harian, Dinas Pendidikan melakukan rekapitulasi secara mingguan, dan tim koordinasi kota melaksanakan evaluasi bersama organisasi perangkat daerah terkait. Meskipun demikian, perubahan mekanisme pelaporan yang terjadi menunjukkan bahwa standar operasional pelaporan masih berada dalam proses penyesuaian dan belum sepenuhnya berjalan secara konsisten.

Kepatuhan dan Responsivitas Kelompok Sasaran

Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran secara umum menunjukkan kecenderungan yang positif, meskipun terdapat perbedaan respons yang dipengaruhi oleh jenjang pendidikan serta kondisi masing-masing sekolah. Sekolah-sekolah yang terlibat pada fase awal pelaksanaan program pada umumnya menerima kebijakan ini dengan baik. Penerimaan tersebut didorong oleh pemahaman pihak sekolah terhadap pentingnya pemenuhan gizi bagi peserta didik, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Tabel 1. Hasil Respon Siswa dan Guru

Jenjang	Respons Siswa	Respons Guru	Kendala Utama
TK	Antusias namun selektif	Positif namun merasa beban kerja menjadi bertambah	Membujuk siswa untuk memakan sayur, keterlambatan distribusi
SD/MI	Sangat positif, senang mendapatkan MBG	Beragam, sebagian guru ingin program ini di uangkan saja	Keterlambatan, variasi pada menu yang terbatas
SMP	Kritis terhadap rasa, berani komplain secara langsung	Mayoritas mendukung, sebagian menganggap merepotkan	Keterlambatan, dan kurangnya variasi pada makanan.
SMA	Pragmatis, makan apa saja yang tersedia, tidak milih-milih	Mendukung dengan catatan penyesuaian	Porsi kurang, minim variasi menu

Sumber : Hasil analisis data penelitian

Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis

Implementasi kebijakan program MBG yang saat ini dijalankan oleh pemerintah Kota Jambi tidak luput dari faktor-faktor penghambat. Hal inilah yang secara teknis mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan suatu program. Adapun faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program MBG antara lain dijelaskan melalui tabel berikut ini :

Tabel 2. Hambatan dari Kekuasaan dan Kepentingan Aktor

Aspek/ Aktor	Masalah	Uraian
Pemerintah Daerah	Keterbatasan kewenangan pengambilan keputusan	Pemerintah daerah masih sangat bergantung pada kebijakan dan anggaran dari pusat sehingga tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengubah atau menyesuaikan program. Sehingga menyebabkan lambatnya respons terhadap perubahan kondisi lapangan.
Hubungan Keuangan pusat-Daerah	Ketidakjelasan mekanisme pendanaan	Belum ada mekanisme pasti penggunaan APBD dalam mendukung pelaksanaan MBG, apakah sebagai anggaran pendamping, substitusi atau kombinasi dengan anggaran dari pusat. Selain itu besaran alokasi juga belum memiliki standar yang jelas sehingga setiap daerah menentukan besaran
Pembagian peran dan Tanggung Jawab	Ketidakjelasan peran kewenangan	Ditemukan ketidakjelasan dalam pembagian peran dan tanggung jawab antar aktor pelaksana yang berdampak pada kebingungan di tingkat operasional. Sehingga berdampak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, serta kekosongan tanggung jawab dalam pelaksanaan program.

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian

Tabel 3. Hambatan dari Karakteristik Kelembagaan dan Rezim yang Berkuasa

Aspek/ Aktor	Masalah	Uraian
Dinas Kesehatan	Keterbatasan SDM	Ketersediaan tenaga sanitarian dan ahli gizi yang secara khusus ditugaskan dalam pelaksanaan program masih relatif terbatas, sementara cakupan program terus mengalami perluasan.
SPPG	Keterbatasan kapasitas produksi	Menghadapi keterbatasan kapasitas operasional, baik dari ketersediaan peralatan dapur maupun jumlah tenaga kerja. Hambatan ini secara langsung menghambat proses produksi, khususnya ketika harus menyiapkan makanan dalam jumlah besar
Regulasi dan SOP	Ketidakjelasan landasan kebijakan yang mengatur MBG	Landasan kebijakan yang mengatur pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis belum tersusun secara menyeluruh dan terintegritas. Hingga saat ini belum ada peraturan daerah hingga peraturan desa yang mengatur pelaksanaan program tersebut
Sistem Pengawasan dan Evaluasi	Lemahnya mekanisme kontrol kualitas	Masih terdapat sejumlah kelemahan dalam mekanisme pengawasan pada makanan yang didistribusikan, sehingga pernah ditemukannya kasus makanan yang tidak layak konsumsi sehingga tidak dapat dibagikan kepada peserta didik.

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian

Tabel 4. Hambatan dari Tingkat Kepatuhan dan Responsivitas

Aspek/ Aktor	Masalah	Uraian
Sekolah Penerima	Keterbatasan kapastian implementasi	Tidak seluruh sekolah penerima mampu melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas pendukung di tingkat sekolah serta belum meratanya pemahaman teknis mengenai prosedur pelaksanaan program.
Partisipasi kelompok sasaran	Keterbatasan keterlibatan aktif	Pola komunikasi yang terbangun umumnya masih satu arah, sementara keterlibatan dalam bentuk pemberian masukan, pemantauan mandiri, maupun partisipasi dalam evaluasi program masih relatif terbatas.
Orangtua dan siswa	Resistensi pasif dan variasi repons	ditemukan adanya respons yang beragam dari orang tua, termasuk bentuk resistensi pasif yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap kebersihan makanan, kesesuaian menu dengan kondisi kesehatan anak, serta preferensi konsumsi siswa. Kondisi tersebut berdampak pada perilaku konsumsi, di mana sebagian siswa tidak menghabiskan makanan yang disediakan, sehingga tujuan pemenuhan gizi belum sepenuhnya tercapai meskipun fasilitas program telah tersedia.

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kota Jambi telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan Grindle, pelaksanaan program masih didominasi oleh pola terpusat, di mana pemerintah pusat memegang kewenangan utama, sementara pemerintah daerah memiliki ruang diskresi yang terbatas meskipun bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis. Berbagai hambatan implementasi ditemukan, antara lain keterbatasan kewenangan daerah, ketidakjelasan pembagian peran dan pendanaan, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan pengawasan, serta perbedaan tingkat kepatuhan dan partisipasi kelompok sasaran. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada desain kebijakan dan sumber daya, tetapi juga pada pengelolaan relasi kekuasaan dan kepentingan aktor, serta kemampuan menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis memerlukan penguatan peran daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, kejelasan regulasi dan koordinasi, serta penguatan komunikasi dengan kelompok sasaran agar tujuan program dapat dicapai secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan meliputi perlunya pemerintah pusat memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam aspek-aspek teknis pelaksanaan program. Pemerintah daerah juga perlu menyusun kerangka regulasi yang terpadu serta memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab antaraktor yang

terlibat. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi hal yang mendesak, terutama melalui penambahan tenaga profesional dan penyempurnaan mekanisme pengawasan. Di sisi lain, strategi komunikasi dan edukasi kepada kelompok sasaran perlu diperkuat guna meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya gizi seimbang dan upaya pencegahan stunting.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Albaburrahim, A. P. A., Putikadyanto, A., Efendi, A. N., M. A. A., Romadhon, S., & Wachidah, L. R. (2025). Program makan bergizi gratis: Analisis kritis transformasi pendidikan Indonesia menuju generasi emas 2045. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial Institut Agama Islam Negeri Madura*, 1(1). <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19191>
- Anggara, S. (2014). *Pengantar kebijakan publik*. CV. Pustaka Setia.
- Antara. (2025, January 27). Makan bergizi gratis dimulai serentak hari ini, sejumlah menteri tinjau ke sekolah. *Detikedu*.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Kencana.
- Ekaputra, A. A., Febrianti, A., Muntaha, A. Y., Trianita, D., & Susanti, P. (2025). Dampak desentralisasi terhadap hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(13), 11–20.
- Febryanti, I., Pane, M. A., Astuti, P., & Administrasi dan Bisnis, F. (2025). Implementasi kebijakan makan bergizi gratis (MBG) (Studi kasus pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang). *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 67–79. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v7i1.26628>
- Idris, I., Wangge, G., W, I., Riekasapti, T. A., Annisa, & Amalia, N. (2025). From hope to despair: Evaluation of MBG's narrative and public communication on X, Instagram, & TikTok. *Monash Data & Democracy Research Hub*.
- Indra, E. (2023). Kebijakan publik dan tantangan implementasi di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98.
- Merlinda, A., & Yusmar, Y. (2025). Analisis program makan gratis Prabowo Subianto terhadap strategi peningkatan motivasi belajar siswa di sekolah tinjauan dari perspektif sosiologi pendidikan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1364–1373. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1360>
- Mujianto, S. (2015). Implementasi kebijakan pendidikan dan peran birokrasi. *Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148–178.
- Nissa, A. K., Candra, M., Humairoh, T., & Gusyuliandari, S. (2025). Kebijakan makanan bergizi gratis: Analisis ekonomi politik dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat studi kasus: SMP Negeri 4 Tanjungpinang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 33–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15521260>

- Nooraini, F. F., Ling, L., & Asmorowati, S. (2025). Bab 8 peran policy entrepreneur dalam program makan bergizi gratis. In *Policy entrepreneur dalam ekosistem kebijakan* (pp. 103–115). PT. Pustaka Saga Jawadwipa.
- Rawis, S. M. (2025). Kebijakan makan bergizi gratis atau suara untuk pemilu?: Kajian literatur dengan pendekatan analisis wacana kritis. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(1).
- Setuningsih, N. (2024, May 26). Menanti kabinet Prabowo-Gibran, pembentukan kementerian khusus program makan bergizi gratis makin menguat. *Kompas.Com*.
- Suryana, E. A., & Azis, M. (2025). Program makan bergizi: Membangun manusia unggul untuk Indonesia emas 2045. In *Kebijakan publik berkelanjutan untuk tata kelola yang lebih baik* (pp. 50–68). Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Yuliana, R. A., & Hermawati, I. (2025). Politik di balik piring: Analisis literatur atas kebijakan makan bergizi gratis. *Seminar Nasional Pemerintahan Dan Desa*, 1(1).